

SKRIPSI

KK
Per 118/99
Far
P

NOER FARIDAHNINGSIH

**POLIGAMI MENURUT UU NO. 1 / 1974
DAN PP NO. 10/1983 SERTA RELEVANSINYA
TERHADAP HUKUM ISLAM**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

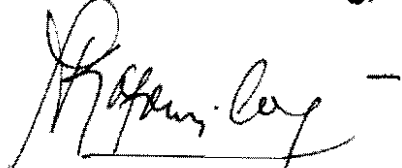
1999

**POLIGAMI MENURUT UU NO. 1 / 1974
DAN PP NO. 10/1983 SERTA RELEVANSINYA
TERHADAP HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamilah, S.H. M.Hum
NIP. 130 531 799

Penyusun,



NOER FARIDAHNINGSIH
NIM. 039514264

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1999

Telah diuji dihadapan Panitia Penguji pada Tanggal 19 Agustus 1999

Panitia Penguji Skripsi :

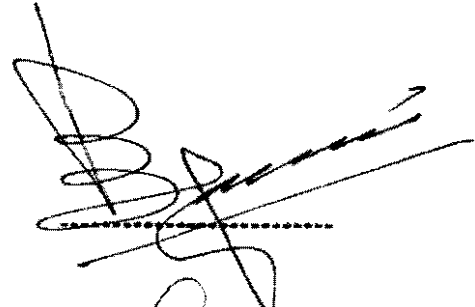
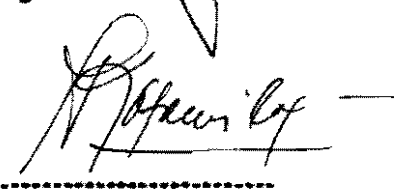

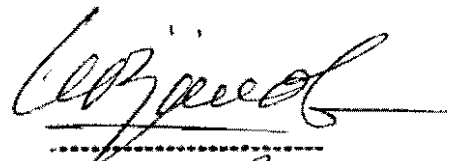

Ketua : H. M. Kobiran, SH., MS.

Anggota : Liliek Kamilah, S.H., M.Hum

Afdol, SH., MS.

H. Umar Hasyim, SH.

Drs. Abdul Shomad, SH., MH.


.....

.....
.....
.....

.....

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan awal sebagai berikut :

- a. Perdebatan mengenai poligami telah cukup lama berlangsung, hal ini dikarenakan adanya beberapa pendapat yang mengatakan bahwa monogami adalah satu-satunya bentuk perkawinan yang paling sesuai sedangkan poligami adalah bentuk perkawinan yang mendiskreditkan wanita.

Poligami menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 pada dasarnya berasaskan asas monogami tetapi asas ini dapat disimpangi bila memang memenuhi syarat yang telah ditentukan, diantaranya syarat harus memperoleh ijin dari Pengadilan, sedangkan poligami bagi PNS menurut PP No. 10/1983 yang mengatur perkawinan poligami harus mendapat ijin dari Pejabat atasannya.

Menurut hukum Islam poligami dapat dilakukan bila suami yang akan melakukan poligami itu dapat berlaku adil.

- b. Adanya kesesuaian dan ketidak sesuaian antara UU No. 1/1974, PP No. 10/1983 dan hukum Islam. Kesesuaian disini adalah adanya

pengurangan dan penambahan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan melakukan poligami .

Meskipun UU No. 1/1974 dan PP No. 10/1983 diharapkan berlaku efektif., namun dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai penyimpangan (poligami ilegal), dalam bentuk pemalsuan surat, pelacuran, prostitusi dan lain-lain. Dimana hal tersebut tidak dibenarkan baik dari segi moral maupun agama.

- c. Islam telah memberikan perlindungan kepada wanita dalam hal suaminya berpoligami yaitu dengan memberikan kewajiban kepada suami agar berbuat baik kepada istri-istrinya.

2. Saran

- a. Hendaknya hukum positif yang mengatur tentang poligami memberikan ketentuan yang jelas dalam hal apa saja suami harus berbuat adil yaitu dalam hal memberi nafkah, tempat tinggal dan waktu bergilir.
- b. Hendaknya aturan poligami yang ada disertai dengan sanksi yang lebih berat kepada setiap orang yang melakukan poligami ilegal agar poligami ilegal tidak menjadi semakin banyak di masyarakat.
- c. Hendaknya aturan poligami yang ada dalam PP No. 10/1983 yang bertentangan dengan UU No. 1/1974 dan hukum Islam tidak diberlakukan lagi.